

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun berkenaan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 30 Juni 2025

KEPALA BAPENDA *f*



SUGIANTO, SE

Pembina TK.I

NIP. 19670317 199002 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan	7
2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	17
 BAB IV PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambar pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah memuat program-program sebagai penjabaran Renstra OPD dan RKPD, bertujuan untuk keselarasan dan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah, dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program K/L dan Provinsi. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah dalam proses penyusunan RAPBD.

Atas dasar hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan dapat menjalankan tugas-tugas pokok dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Harapan tersebut akan menjadi komitmen kami yang dapat dituangkan dalam suatu perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa “Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025”.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pijakan dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten

- Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 13 Nomor 12);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
 13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.
 14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan, dimaksud sebagai Dokumen Perencanaan Program Kegiatan yang memuat sasaran yang akan

dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Indikator kinerja sasaran dan target masing-masing indikator sasaran program yang direncanakan.

TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 adalah untuk:

- Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati kedalam Bentuk Kebijakan dan Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
- Sebagai Instrumen untuk mempermudah dalam mengukur Kinerja dan mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tertentu.
- Meningkatkan Efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Sumber-sumber Potensi Daerah. Terutama berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Menjelaskan tugas – tugas pokok dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

2.1 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan

**2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah**

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I

Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun berkenaan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, selanjutnya kedepan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas.

TABEL 2.1

NAMA SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNGPINANG

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	TARGET RENCANA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Rencstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencstra Perangkat Daerah sampai dengan Rencja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	TARGET KINERJA dan anggaran Rencja Perangkat daerah tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencstra Perangkat Daerah s.d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	unit Perangkat daerah yang bertanggung jawab												
1	2	3	4	K	Rp	5	K	Rp	6	K	Rp	7	K	Rp	8	K	Rp	9	K	Rp	10	K	Rp	11	K	Rp	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100%	15			
		KELUANGAN			108.631.646.000						45.835.378.536							0			0			0			2.551.710.064	48.181.180.446		44,35%			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai AKIP	83,00 70,00		82,06 78,44																											
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	77.042.196.000	66,55%	2,06%				36.630.138.695	16,67%			2.460.190.064	11.976.854.783	0				0			0			2.06%	68,61%	38.884.420.605	88,61%	50,47%		
		Perencanaan, Pengalangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Dokumen	1.475.000.000	28 Dokumen	1 Dokumen				376.883.250	5 Dokumen			1.000.000	44.188.800		0			0			0		1 Dokumen	29 Dokumen	76,32%	377.883.250	76,32%	25,62%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32 Dokumen	621.800.000	24 Dokumen	1 Dokumen				242.796.500	4 Dokumen			1.000.000	24.808.800										1 Dokumen	25 Dokumen	76,13%	243.796.500	76,13%	39,21%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	72 Laporan	853.200.000	48 Laporan					134.086.750	12 Laporan				19.380.000											48 Laporan	66,67%	134.086.750	66,67%	15,72%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	6 Dokumen	45.406.000.000	4 Dokumen	Dokumen				26.329.213.962	1 Dokumen			1.479.762.735	8.067.070.383					0							4 Dokumen	86,67%	27.808.976.697	86,67%	61,25%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	339 Orang/Bulan	41.960.000.000	187 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan				25.143.805.462	60 Orang/Bulan			1.421.442.735	7.805.100.383											45 Orang/Bulan	232 Orang/Bulan	68,44%	26.565.248.197	68,44%	63,31%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	4	5	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	6	Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat daerah yang bertanggung jawab
								7	8	9	10	11	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	I	II	III	IV	12-8-9-10-11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100%	15			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	K 6 Dokumen	Rp 2.205.000.000	K 4 Dokumen	Rp 1.116.526.500	K 1 Dokumen	Rp 248.280.000	K Dokumen	Rp 58.320.000				K Dokumen	Rp 58.320.000	K 66,67%	Rp 1.174.846.500	K 53,28%		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	K 10 Dokumen	Rp 366.000.000											Rp 0	K 0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestralan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestralan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestralan SKPD	K 72 Laporan	Rp 875.000.000	K 24 Laporan	Rp 68.882.000	K 12 Laporan	Rp 13.690.000							Rp 68.882.000	K 33,33%		Rp 68.882.000	K 7,87%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	K 72 Laporan	Rp 414.000.000	K 24 Laporan	Rp 122.473.000	K 12 Laporan	Rp 17.933.600							Rp 122.473.000	K 33,33%		Rp 122.473.000	K 29,58%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	K 72 Laporan	Rp 414.000.000	K 24 Laporan	Rp 122.473.000	K 12 Laporan	Rp 17.933.600							Rp 122.473.000	K 33,33%		Rp 122.473.000	K 29,58%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	K 6 Dokumen	Rp 1.590.000.000	K 4 Dokumen	Rp 434.460.000	K 1 Dokumen	Rp 100.200.000							Rp 434.460.000	K 66,67%		Rp 434.460.000	K 27,32%	
		Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	K 10 Paket	Rp 920.000.000	K 6 Paket	Rp 416.460.000		Rp 100.200.000							Rp 416.460.000	K 60,00%		Rp 416.460.000	K 45,27%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	K 50 Orang	Rp 410.000.000											Rp 0	K 0,00%		Rp 0	K 0,00%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	K 48 Orang	Rp 260.000.000		Rp 18.000.000									Rp 18.000.000	K 8,33%		Rp 18.000.000	K 6,92%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Umum Perangkat Daerah	K 72 Laporan	Rp 7.980.500.000		Rp 4.702.738.878	K 12 Laporan	Rp 1.071.516.000							Rp 240.392.899	K 70,83%		Rp 4.943.131.777	K 61,94%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Timbulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		unit Perangkat daerah yang bertanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=6+12	14=13/5 x 100%							15		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	323 Unit	4.450.000.000	16 Unit	187.400.000				11 Unit	87 Unit	26,93%	21,40%								
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	500.000.000						0	0	0,00%	0,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Laporan	6.281.196.000	12 Laporan	1.725.586.000				3 Laporan	51 Laporan	70,83%	23,18%								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	101.100.000	12 Laporan	13.500.000				3 Laporan	51 Laporan	70,83%	37,76%								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	1.645.096.000	12 Laporan	210.000.000				3 Laporan	51 Laporan	70,83%	48,06%								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	4.535.000.000	12 Laporan	1.502.086.000				3 Laporan	51 Laporan	70,83%	13,83%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.435.500.000	16,67%	608.448.000				2,52%	65,97%	65,97%	38,07%								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	622.000.000	1 Unit	96.260.000						66,67%	0,00%								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	262 Unit	1.835.000.000	40 Unit	339.810.000				Unit	167 Unit	63,74%	53,93%								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)	unit Perangkat daerah yang bertanggung jawab				
					6		7		I				II				III							IV			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Unit	2.400.000.000	5 Unit	174.444.000	1 Unit	235.750.000																		
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	66 Laporan	2.410.000.000	44 Laporan	1.096.883.250	11 Laporan	272.964.000																		
		Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	25 Laporan	3.200.000.000	17 Laporan	897.517.450	4 Laporan	7.100.000																		
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Dissusutkan NUOP nya	15000 Obyek Pajak	3.685.000.000	14.033 Obyek Pajak	1.191.057.650	2500 Obyek Pajak	139.700.000																		
		Pemeliharaan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kelelapan Pajak Daerah	18 Dokumen	3.595.000.000	12 Dokumen	1.046.137.011	3 Dokumen	319.399.000																		
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	320 Layanan	688.000.000	206 Layanan	44.244.200	60 Layanan	6.890.000																		
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	48 Dokumen	2.303.700.000	32 Dokumen	698.488.000	8 Dokumen	31.436.000																		
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	55 Dokumen	4.700.000.000	40 Dokumen	1.746.675.300	10 Dokumen	462.845.800																		
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	160 Dokumen	740.000.000	104 Dokumen	39.601.000	30 Dokumen	9.608.000																		

2.2. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal maupun eksternal yang menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Kekuatan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola Pendapatan Daerah antara lain :

1. Adanya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. Tersedianya anggaran yang memadai dalam menggerakkan aktivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun Kelemahan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Sumber daya manusia yang belum memadai khususnya dalam hal pendapatan daerah
2. Sarana dan Prasarana terbatas, berdampak kepada Kualitas dan Kuantitas Aparatur.
3. Peraturan Perundang – Undangan tentang Pajak/ Retribusi Daerah.

Peluang yang dimiliki oleh Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah
2. Letak Geografis yang strategis dengan potensi pendapatan daerah yang belum dikelola secara optimal.
3. Adanya sistem dan prosedur serta pelimpahan wewenang sebagai dasar dan acuan mengelola keuangan daerah.

Beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan (ancaman) dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Ketersediaan potensi sumber daya alam belum sepenuhnya dikelola dan bergantung kepada harga pasaran antara *Supply* dan *Demand*, seperti halnya harga pasar dunia untuk harga Walet yang tidak stabil.
2. Sistem pengelolaan keuangan di organisasi instansi pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu dilaksanakan.
3. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah didukung dengan regulasi peraturan daerah, anggaran yang memadai yang ditunjang ketersediaan personil dan mobilitas operasional yang memadai untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan. Peluang / potensi yang ada masih dapat untuk diberdayakan, didukung dengan aparatur dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, penyusunan program pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
KEUANGAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	APBD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	APBD

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	APBD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	APBD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
8	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	APBD
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	APBD
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD
15	Pengadaan Mebel	APBD
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
24	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	APBD
25	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	APBD
26	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	APBD
27	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	APBD

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
28	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	APBD
29	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	APBD
30	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	APBD
31	Penetapan Wajib Pajak Daerah	APBD
32	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	APBD
33	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	APBD
34	Penagihan Pajak Daerah	APBD
35	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	APBD
36	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	APBD
37	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	APBD

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RENJA 2025				DPA 2025	Lokasi	RENJA PERUBAHAN 2025				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sebelum Perubahan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-7	13		
5.02		KEUANGAN			23.657.000.000	13.124.394.383				13.666.773.383	542.379.000			
5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NIKOTA			16.910.000.000	11.483.452.183				11.917.396.183	433.944.000			
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	350.000.000	34.438.800		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%					
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	150.000.000	20.308.800		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	38.038.800	3.600.000			
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	200.000.000	14.130.000		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	23.908.800	3.600.000	APBD		
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	200.000.000	14.130.000		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	14.130.000	-	APBD		
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.060.000.000	8.061.070.383		Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.061.070.383	-			
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	8.400.000.000	7.805.100.383		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/Bulan	7.805.100.383	-	APBD		
	5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	475.000.000	248.280.000		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	248.280.000	-	APBD		
	5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			-	APBD		
	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	185.000.000	7.690.000		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	7.690.000	-	APBD		
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	100.000.000	1.216.000		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	1.216.000	-			
	5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	100.000.000	1.216.000		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.216.000	-	APBD		
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	200.000.000	100.200.000		Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	102.450.000	2.250.000			
	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	200.000.000	100.200.000		Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	102.450.000	2.250.000	APBD		
	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-	APBD		

No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RENJA 2025				DPA 2025		Lokasi	RENJA PERUBAHAN 2025			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sebelum Perubahan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024		Setelah Perubahan				
	5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-	APBD	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	1.870.000.000	674.629.000			Jumlah Laporan Penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	967.673.000	293.044.000		
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	100.000.000	22.643.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	22.643.000	-	APBD	
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	375.000.000	170.563.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	196.273.000	25.710.000	APBD	
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	120.000.000	34.650.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	34.650.000	-	APBD	
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	275.000.000	98.166.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	98.166.000	-	APBD	
	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	15.000.000	12.600.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	12.600.000	-	APBD	
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	985.000.000	336.007.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	603.341.000	267.334.000	APBD	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.580.000.000	341.912.000			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	423.912.000	82.000.000		
	5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-	APBD	
	5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	180.000.000	154.512.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	154.512.000	-	APBD	
	5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	20 Unit	200.000.000				Jumlah Mebel yang disediakan	20	28.800.000	28.800.000	APBD	
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	1.200.000.000	187.400.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	240.600.000	53.200.000	APBD	
	5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			-	APBD	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2.500.000.000	1.725.586.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.725.586.000	-		
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000	13.500.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.500.000	-	APBD	
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000	210.000.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.000.000	-	APBD	
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.125.000.000	1.502.086.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.502.086.000	-	APBD	

No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RENJA 2025				RENJA PERUBAHAN 2025				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	DPA 2025 Sebelum Perubahan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Setelah Perubahan		
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.250.000.000	544.400.000		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	597.450.000	53.050.000	
	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	150.000.000	90.332.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	90.332.000	-	APBD
	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	45 Unit	425.000.000	307.830.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	45 Unit	307.830.000	-	APBD
	5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara				BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Mebel yang dipelihara			-	APBD
	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	375.000.000	74.430.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	127.480.000	53.050.000	APBD
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	300.000.000	71.808.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	71.808.000	-	APBD
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16%	6.747.000.000	1.640.942.200		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16%	1.749.377.200	108.435.000	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111.945.600.000	6.747.000.000	1.640.942.200		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111.945.600.000	1.749.377.200	108.435.000	
	5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	295.000.000	13.102.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	13.102.000	-	APBD
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	300.000.000	39.785.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	39.785.000	-	APBD
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	552.000.000	157.180.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	157.180.000	-	APBD
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	550.000.000	235.750.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	235.750.000	-	APBD
	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	500.000.000	257.234.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	303.434.000	46.200.000	APBD
	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	650.000.000	2.210.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	2.210.000	-	APBD

No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RENJA 2025				DPA 2025		Lokasi	RENJA PERUBAHAN 2025			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sebelum Perubahan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024		Setelah Perubahan				
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2500 Obyek Pajak	750.000.000	139.700.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2500 Obyek Pajak	139.700.000	-	APBD		
	5.02.04.2.01.08	Pencapaian Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	720.000.000	283.102.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	307.837.000	24.735.000	APBD		
	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 Layanan	150.000.000	2.031.600	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 Layanan	2.031.600	-	APBD		
	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	8 Dokumen	495.000.000	31.436.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	8 Dokumen	31.436.000	-	APBD		
	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	950.000.000	430.067.800	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	467.567.800	37.500.000	APBD		
	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	30 Dokumen	175.000.000	9.608.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	30 Dokumen	9.608.000	-	APBD		
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemertiksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemertiksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	400.000.000	8.760.800	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pemertiksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	8.760.800	-	APBD		
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Laporan	260.000.000	30.975.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Laporan	30.975.000	-	APBD		
J U M L A H						23.657.000.000	13.124.394.383			13.666.773.383	542.379.000			

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun berkenaan. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta peran aktif semua pihak yang terkait.

Kuala Tungkal, 30 Juni 2025

KEPALA BAPENDA, f



SUGIANTO, SE

Pembina TK. I

NIP. 19670317 199002 1 001